

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Krisis Kemanusiaan menjadi peristiwa yang selalu menjadi perhatian karena terus hadir hingga abad ke-21. Krisis Kemanusiaan tetap melanda umat manusia. Krisis Kemanusiaan adalah suatu keadaan yang dimana hak dasar daripada manusia tidak terejawantahkan. Hak yang dimaksud adalah seperti hak hidup, hak untuk mendapatkan rasa aman dan hak untuk mendapatkan suatu keadilan. Adanya Krisis kemanusiaan sering kali terjadi atas adanya konflik di ruang lingkup tempat tinggal dan kelompok karena adanya perselisihan. Isu mengenai identitas suatu negara selalu menjadi isu yang sering terjadi di dalam isu Internasional. Selain berdampak pada keamanan regional maupun global, dampak dari pencarian identitas ini juga mengarah terhadap kekerasan atau pelanggaran HAM yang terjadi seperti, terjadinya pelanggaran HAM biasanya terjadi karena adanya perbedaan etnis, ras dan agama ataupun yang bersinggungan dengan SARA

Krisis Kemanusiaan dampak konflik menyebabkan hadirnya pelanggaran HAM, contohnya adanya kekerasan, penganiayaan dan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi hak – hak yang sifatnya fundamental sebagai manusia. Pemerintah terkait selanjutnya perlu mengambil suatu tindakan untuk dapat menyelesaikan konflik sehingga dapat meminimalisir jatuhnya korban yang lebih banyak dan mencegah kerugian yang lebih besar. (Indah Anggaraini,2017)

Namun, apabila pemerintah tidak mempunyai keseriusan dalam mengatasi konflik yang terus terjadi maka akan menyebabkan krisis kemanusiaan yang semakin berkembang dan memberi efek terhadap wilayah yang berkonflik dengan semakin terjadinya diskriminasi terhadap suatu etnis tertentu.

Isu Krisis Kemanusiaan yang kini semakin meningkat di kancah global menjadi bahan diskusi yang sangat hangat dan menjadi sorotan internasional. Seperti halnya dengan korban karena bencana alam lalu berdampak kepada negara-negara yang lain untuk turut membantu kepada negara yang sedang mengalami hal tersebut. Kemudian daripada itu dampak akibat adanya musibah itu juga berbeda-beda tergantung dari tingkatan, mulai dari individu, kerabat atau keluarga hingga pada komponen dan struktural.

Krisis kemanusiaan sendiri menjadi tantangan tersendiri untuk setiap warga negara di seluruh belahan dunia untuk mengatasi hal ataupun masalah tersebut agar krisis kemanusiaan ini tidak semakin melebar dan memperkeruh kondisi global. Dengan menjadi kedudukan internasional, tentunya krisis kemanusiaan ini menjadi tanggung jawab wajib untuk seluruh warga negara dengan bekerja sama dan saling membantu untuk melakukan upaya agar krisis kemanusiaan ini tidak bertambah setiap waktunya, dan kehidupan setiap warga negara menjadi lebih baik.

Berkembangnya isu krisis kemanusiaan internasional sangat mudah untuk memperlebar karena arus globalisasi yang akan terus meningkat sepanjang waktunya. Hal ini pun menjadi pemicu dari timbulnya krisis kemanusiaan, dimana tidak semuanya masyarakat mendapatkan hak untuk hidup dengan sebagaimana mestinya. Oleh karena

itu krisis kemanusiaan merupakan salah satu yang tidak dapat dipisahkan. Krisis kemanusiaan mendorong terjadinya upaya untuk mengatasi berbagai pelanggaran hak asasi manusia, terutama akibatnya terjadi konflik bersenjata maupun kejahatan baik secara kolektif dalam system negara, baik regional ataupun global. (Prayetno,2017)

Krisis kemanusiaan semakin buruk dan menjadi gerbang awal terciptanya mimpi buruk bagi negara yang mengalami dan negara lain yang terlibat. Seperti misalnya konflik yang terjadi di Suriah pada tahun 2011. Dengan begitu konflik ini menjadi salah satu dari sekian banyak konflik yang terjadi hingga sekarang yang banyak mengakibatkan krisis kemanusiaan. (Fahham ,A.M dan Kartaatmaja A,M, 2016)

Indonesia adalah salah satu negara di asia tenggara yang merupakan bangsa yang beragam dan memiliki hal yang serupa dengan Myanmar dalam hal suku,kelompok etnis dan bahasa. Di mulai dari masa kolonial kedua negara ini memiliki hubungan kerjasama yang kuat dan menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia dari Belanda adalah Myanmar.

Indonesia pun melakukan hal yang serupa yaitu mendukung dan mengakui kemerdekaan Myanmar dari Inggris. Kedua negara ini telah menjalin hubungan kerjasama dari tahun 1949 yang dimana presiden soekarno menikmati hubungan dengan solid bersama perdana Menteri U Nu,yang juga mendukung dan menjadi kekuatan di balik Konferensi Asia-Afrika 1955 di Kota Bandung. (Muhammad Harry dan Riana Nugraha,2016)

Hubungan tersebut pun berlanjut dimasa militer yang mendominasi

pemerintahan di Myanmar yang dilakukan oleh junta militer. Pemerintahan Myanmar pada masa itu dikuasai oleh para jendral melalui *state law and order restoration council* (SLORC) yang pada dasarnya memerintah dengan tangan besi dalam artian pemerintah sering melanggar HAM, merebut kekuasaan yang sah bahkan melakukan pelanggaran aturan sistem otoriter hukum yang dimiliki negara. Maka dari itu tidak menjadi hal baru bahwa SLORC tidak mendapatkan dukungan rakyat dan juga SLORC tidak berhasil merebut mayoritas untuk duduk di kursi parlemen dalam masa pemilihan yang terakhir, yang berlangsung pada 27 Mei 1990. Akan tetapi SLORC dengan bersikeras bahwa hanya mereka yang dapat menyelamatkan bangsa. SLORC pun mengetahui mayoritas orang yang mereka kendalikan tidak ingin diselamatkan oleh para jendral pada saat yang bersamaan. Dengan ini kemudian SLORC mempertimbangkan contoh lain dari sistem kediktatoran militer dapat mengambil fungsi sebagai penguasa suatu negara sambil tetap menikmati dukungan dari mayoritas penduduk. (California press, 2014)

Hubungan Indonesia dan Myanmar pun berlanjut kepada aspek Politik, Ekonomi dan Sosial. Hubungan ekonomi antara kedua negara telah terbangun sejak era kemerdekaan, untuk melanjutkan hubungan ekonomi yang lebih substantial, Indonesia dan Myanmar pada awalnya memperdagangkan beras dengan rempah-rempah. Meskipun dalam membangun kerjasama dalam aspek ekonomi khususnya perdagangan belum mencapai hasil yang begitu signifikan. Karena bagi Indonesia mitra dagang yang utama itu adalah Amerika Serikat, Jepang dan Cina. Sedangkan untuk Myanmar sendiri itu ada Cina, Thailand dan Jepang sebagai mitra

dagang yang utama. (Yulianna Fauzi,2017)

Peran Indonesia dalam membuka hubungan bilateral dengan Myanmar hingga 2016 berada pada peringkat ke-13 di Myanmar dalam lingkup investasi. Namun pada sebaliknya Myanmar hanya menginvestasikan sekitar US\$ 0,6 juta di Indonesia. Kemudian menurut Kamar dagang dan industri Indonesia (KADIN), pada 2016 Investasi Indonesia di Myanmar sekitar US\$ 700 juta dikarenakan Presiden Joko Widodo menekankan BUMN untuk meningkatkan Investasi pertambangan,Infrastruktur dan Telekomunikasi yang dirasa masih ada ruang untuk meningkatkan nilai perdagangan dan investasi Indonesia di Myanmar. (Heri Ruslan,2022)

Sedangkan untuk hubungan bilateral kedua negara ini dalam aspek informasi,sosial dan budaya, KBRI Yangon memiliki rencana strategis 2015-2019 yang dimana ada inisiasi yang ditingkatkan untuk merealisasikan hal itu dengan cara meningkatkan promosi pariwisata, seni dan budaya Indonesia di Myanmar, juga meningkatkan reputasi Indonesia di Myanmar dan luar negeri dengan program joint cultural show. Dilanjut bahwa Indonesia memiliki sekolah asing yang berada di yangon dengan 448 siswa non-WNI dan 48 siswa WNI.

Hubungan diplomatik Indonesia dan Myanmar dalam aspek politik terjalin jauh sebelum masa kemerdekaan Myanmar pada tahun 1948 yang dimana kantor perwakilan Republik Indonesia telah ada setahun sebelum kemerdekaan Myanmar di Yangon, tetapi hubungan diplomatik tersebut baru disahkan pada tahun 1949 semenjak Myanmar mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia, menurut sejarah

hubungan politik berkembang pada saat Myanmar mengikuti konferensi hubungan asia dan membela Indonesia dari serangan militer Belanda. (Arifin Suryo Nugroho,2016)

Terlepas dari permasalahan internal di Myanmar, seperti adanya transisi kekuasaan militer di bawah kepemimpinan jenderal Ne win dan pergeseran negara ke filosofi sosialis, hubungan bilateral Indonesia dan Myanmar tetap solid bahkan setelah kedua negara merdeka. Ketika Presiden Suharto mengunjungi Myanmar pada tahun 1974, Jenderal Ne Win menyambutnya dengan baik. Lalu kedua pemimpin pun berpidato bahwa ditegaskan hubungan kedua negara tersebut telah terjalin sebelum kemerdekaan negara atas dasar prinsip-prinsip yang kuat bukan untuk matrealistis. Dalam proses Myanmar terafiliasi dengan ASEAN, Indonesia juga memiliki pengaruh yang begitu penting. Saat menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara di bawah Suharto, Yusril Ihza Mahendra mengklaim bahwa Suharto memiliki peran penting dalam mempengaruhi mentalitas Myanmar selama hampir 30 tahun menutup diri. Suharto dikabarkan berusaha meyakinkan negara-negara ASEAN untuk mengakui Myanmar sebagai anggota, dan pada akhirnya, Myanmar bergabung dengan ASEAN pada tahun 1997. (M.Anwar.2022)

Etnis Rohingya merupakan penduduk minoritas yang beragama Islam dan bertempat tinggal di daerah Myanmar tepatnya Provinsi Arakan di sisi sebelah barat laut Myanmar berbatasan dengan Bangladesh, dan sekarang dikenal dengan provinsi Rakhine atau Rakhaing. Diperkirakan bahwa etnis Rohingya adalah keturunan campuran (Arab, Moor, Turki, Persia, Mogul dan Pathan), Bengali lokal dan Rakhine. Mereka berbicara versi Chittagonian, dialek regional Bengali yang juga digunakan

secara luas di seluruh bagian tenggara Bangladesh (UNHCR, 2011)

Paska kemerdekaan Myanmar, yaitu pada masa kepemimpinan Jenderal Aung San, etnis Rohingnya menjadi salah satu etnis yang memiliki peranan dalam pemerintahan Bahkan ada warga Rohingnya yang menjadi menteri di pemerintahan Myanmar pada tahun 1940-1950. Namun, pada tahun 1962 ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta hingga pada akhirnya Ne Win berhasil menjadi Presiden di Myanmar, sistem politik Myanmar berubah menjadi lebih otoriter.

Konflik yang kerap muncul di Myanmar yang melibatkan antar etnis terjadi dalam kurun 1991 sampai sekarang. Banyak faktor yang menjadi pemicu awal dari konflik yang berkepanjangan ini, mulai dari kasus pemerkosaan, diskrimasi warga minoritas dan masalah entitas etnis. Perlakuan diskriminatif terhadap Etnis Rohingnya, antara lain disebabkan oleh status mereka yang berbeda. (Triono, 2014). Salah satu akar konflik tersebut adalah status etnis Rohingya yang masih dianggap imigran ilegal di Myanmar. Pemerintah Myanmar juga tidak mengakui serta tidak memberi status kewarganegaraan kepada mereka. Sebagai akibat karena tidak memiliki kewarganegaraan, etnis Rohingya tidak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan pekerjaan yang layak. (Waluyo, 2013)

Krisis Kemanusiaan ini terjadi terhadap suku Rohingya di Myanmar yang telah menjadi perhatian dunia Internasional. termasuk Indonesia. Bagi pemerintah Indonesia, kasus kemanusiaan yang dialami etnis Rohinya merupakan masalah yang penting untuk diselesaikan, terlebih lagi, Indonesia menjadi salah satu negara yang dijadikan tujuan bagi etnis Rohinga untuk menyelamatkan diri dari Myanmar. Dengan demikian

disamping nilai kemanusiaan, Indonesia juga memiliki kepentingan untuk aktif mencari solusi masalah krisis kemanusiaan tersebut, karena Indonesia terkena dampak secara langsung dari kasus krisis kemanusiaan itu (Moy & Kusuma, 2016).

Krisis kemanusiaan Rohingya yang terjadi juga disebabkan karena adanya konflik yang melibatkan antara etnis Rohingya dengan etnis Rakhine dan diskriminasi pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya menyebabkan orang-orang Rohingya memutuskan untuk meninggalkan Myanmar dan mengungsi ke negara-negara ASEAN lainnya.

Sebagai sebuah negara yang berdaulat, seharusnya Myanmar memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM terhadap warga Rohingya ini harus segera ditempuh oleh pemerintah Myanmar untuk penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jika tidak ada langkah-langkah efektif yang ditempuh oleh pemerintahan Myanmar dalam memberikan perlindungan terhadap suku Rohingya, maka memang seharusnya mekanisme hukum internasional merupakan alternatif yang harus ditempuh untuk memberikan perlindungan terhadap HAM bagi suku Rohingya serta menjaga stabilitas regional maupun global.

Penderitaan suku Muslim Rohingya ini tentu berimplikasi pada situasi keamanan salah satunya ialah keamanan regional di negara yang memang secara geografis sangatlah berdekatan, seperti Asia Tenggara. Perjalanan yang dilakukan oleh etnis Rohingya sangat berbahaya, melarikan diri keluar dari Myanmar menuju negara-negara sekitarnya justru menjadi masalah baru bagi negara yang disinggahi.

Bangladesh, Malaysia, Thailand dan Indonesia yang menjadi negara terdekat dengan Myanmar tentu akan kebanjiran pengungsi orang Rohingya.

Kehadiran pengungsi Rohingya tentu akan menjadi sebuah dilema bagi negara-negara Asia Tenggara terutama negara yang menjadi persinggahan mereka. Di satu sisi menerima pengungsi adalah salah satu bentuk kemanusiaan, namun di sisi lain kehadiran pengungsi akan menjadi masalah baru bagi internal negara mereka. Kondisi inilah yang menjadi masalah krisis kemanusiaan terhadap orang Rohingya sulit untuk diselesaikan, sehingga tahun hingga saat ini konflik ini belum dapat terselesaikan secara tuntas. Secara keamanan apa yang menimpa etnis Rohingya tidak lagi memenuhi ketentuan konsep keamanan manusia yang mana diyakini sebagai konsep kehidupan manusia yang layak. Secara ringkas United Nations Development Programme (UNDP) mendefinisikan keamanan manusia sebagai berikut:

“First safety from such chronic threats such as hunger, disease, and repression. And second, it means protection from sudden and hurtful disruptions in the patterns of daily life --- whether in homes, in jobs or in communities. Such threats can exist at all levels of national income and development.” (UNDP, 1994).

Akibat dari krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya, mereka memutuskan untuk mengungsi ke beberapa negara. Pada kenyataannya, etnis Rohingya sejak lama telah mengungsi ke luar negeri meninggalkan tempat tinggal mereka di Myanmar. Hal ini mengingat krisis kemanusiaan dan juga keamanan yang menimpa Etnis Rohingya telah sangat lama terjadi.

Konflik yang terus menjatuhkan korban dari waktu ke waktu memerlukan penyelesaian agar korban tidak terus berjatuhan. Peran pemerintah kemudian

dibutuhkan dalam penanganan konflik yang semakin memperpanjang krisis kemanusiaan di Myanmar. Rohingya yang mengalami kerugian lebih banyak, memerlukan perhatian lebih dari pemerintah terkait. Namun, pada kenyataannya Rohingya tidak mendapat perhatian dari pemerintah Myanmar malah mendapat perlakuan diskriminasi dan menambah penderitaan etnis Rohingya.

Setelah konflik 2012, Rohingya semakin gencar untuk pergi mengungsi dari Myanmar. Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNCHR) memperkirakan bahwa lebih dari 150.000 jiwa etnis Rohingya dan Bangladesh telah meninggalkan Myanmar dengan menggunakan kapal sejak 2012. Satuan Pengawasan Maritim UNHCR pula menjelaskan antara Juni 2012 dan Agustus 2014, diperkirakan 87.000 Rohingya dan Banglades melakukan perjalanan laut berbahaya dari Teluk Banggala.(Sari,Fifit Ayu Kartika,2016)

Jika pendekatan dalam keamanan manusia mengedepankan umat manusia sebagai dasar dari keamanan, maka hal ini akan berimplikasi kepada keamanan internasional yang tergantung kepada keamanan dari individual. Dengan menempatkan individu sebagai dasar dalam mencapai keamanan, keamanan manusia berasumsi bahwa keselamatan dari individu merupakan kunci bagi terciptanya keamanan secara global, dimana saat keamanan individu terancam maka demikian pula dengan dasar dari keamanan internasional yang akan berada dalam ancaman pula.

Krisis keamanan dan pencarian identitas diaspora Rohingya di Myanmar dapat memiliki dampak yang signifikan pada keamanan global. Konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar telah berlangsung selama beberapa dekade, dan

telah menghasilkan kekerasan, penganiayaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Pada akhirnya, konflik tersebut dapat menciptakan krisis kemanusiaan yang lebih besar, yang dapat menimbulkan dampak buruk pada stabilitas regional dan global. Di samping itu, pencarian identitas diaspora Rohingya dapat meningkatkan risiko radikalisasi, terorisme, dan konflik di wilayah tersebut.

Selain itu, masalah Rohingya telah memicu perdebatan internasional tentang hak asasi manusia dan kewajiban negara untuk melindungi warga negara mereka. Jika situasi ini tidak ditangani dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan komunitas internasional, hal tersebut dapat menimbulkan ketidakstabilan yang lebih besar di wilayah tersebut. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah Myanmar dan komunitas internasional untuk bekerja sama dalam mengatasi krisis ini dengan cara yang damai dan bermartabat, serta memastikan hak asasi manusia semua warga negara dijaga dengan baik. Tindakan ini dapat membantu mengurangi risiko konflik dan ketidakstabilan di wilayah tersebut, serta menjaga keamanan global secara keseluruhan.

Adapun peran Indonesia dalam membantu etnis Rohingya ini menjadi inisiator di dalam organisasi di wilayah asia tenggara karena ASEAN sendiri tidak dapat mengambil peran secara jauh di dalam konflik ini dikarenakan adanya prinsip *non-interference* yang dianutnya. Oleh karena itu mengapa akhirnya Indonesia yang mengambil bagian dalam isu kemanusiaan karena Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim kemudian turut perihatin atas kondisi tersebut yang mana hal tersebut dapat dilihat dari keaktifan Indonesia dalam memenatau dan juga merespon isu terkait dan juga turut memberi bantuan luar negeri kepada etnis tersebut.

Dengan begitu Indonesia melihat latar belakang daripada isu tersebut menjadi mediator dalam bentuk untuk menengahi dengan bentuk diplomasi yang dimana menjadikannya berhadil terpilih menjadi anggota dewan HAM PBB. Dalam konteks penanganan konflik disuatu negara sendiri, kurang lebih terdapat tiga peluang dalam politik luar negeri yang dilakukan oleh negara, yaitu : 1) Membela kepada negara induk (*host country*), 2) Membela kepada pemberontak, 3) Atau memilih netral atau ambivalen. Kemudian pada pengejawantahan nya dalam menangani isu terkait di suatu negara, pasti Indonesia akan pada salah satu posisi tersebut. (Zahidi, 2015; 77-80)

Oleh karena itu, Indonesia menanggapi dengan cukup serius terkait konflik tersebut. Maka dari itu Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan luar negeri pada krisis kemanusiaan etnis muslim Rohingya. Indonesia sendiri pun memiliki kepentingan di dalamnya, selain daripada representasi dari UUD 1945 dengan bunyi “turut menjaga perdamaian dunia”, isu ini terjadi di Kawasan asia tenggara yang dimana jika tidak segera ditindak lanjuti maka akan terjadi dampak pada keamanan regional. Motif daripada Indonesia memberikan bantuan luar negeri yaitu pada dasarnya hanya sebagai *humanitarian motives* sebagai bentuk kepedulian atas krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya.

Tidak hanya bantuan luar negeri semata, hal lain pun Indonesia turut mengupayakan dengan melakukan diplomasi dengan gencar sebagai bentuk kemanusiaan pula, setidaknya terdapat 3 strategi diplomasi yang telah dijalankan sejauh dengan realita yang ada bagi Indonesia sebagai Langkah dalam ikut menyelesaikan permasalahan tersebut. Pertama, pemerintah sebagai aktor yang

menciptakan perdamaian dengan cara diplomasi. Relative power atau politik dari Indonesia wajib mengontrol, mengintervensi, atau mempengaruhi negara lain merupakan pendapat dasar daripada diplomasi itu sendiri pada skala internasional. Indonesia melakukan diplomasi untuk membantu menengahi konflik di Myanmar yang berhubungan pada etnis Rohingya ialah (Sundari et al ., 2021;183) :

- 1) Secara personal Indonesia melakukan pendekatan melalui Government to Government dengan ajuan pemerintah Myanmar dapat menyelesaikan konflik kepada etnis tanpa diskriminasi
- 2) Tekanan dari Indonesia untuk ASEAN terlibat karena sebagai wadah dari masyarakat asia tenggara untuk mendorong pemerintah Myanmar berupaya untuk menyelesaikan konflik.
- 3) Membangun kamp-kamp untuk para pengungsi dan memberi dana hibah sebesar 7,5 miliar sebagai bentuk bantuan.
- 4) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, mulai dari bantuan secara teknis maupun psikis.
- 5) Memberikan bantuan melalui program Kerjasama inklusif yang selanjutnya dilakukan dengan rehabilitas Bersama.

Kedua, aktor diplomasi pun tak hanya negara melainkan aktor non-negara atau organisasi yang dapat juga menjadi sebuah inisiator perdamaian serta resolusi konflik melalui diplomasi. Pun, Indonesia juga merajut aktor-aktor tersebut salah satunya OKI (organisasi Kerjasama islam) untuk dapat kebersamai dalam penyelesaian konflik.

Ketiga, penggerakan kepada masyarakat atau publik untuk memberikan perhatiannya yang lebih pada kasus ini melalui pola yang inisiatif dan interaktif melalui media untuk memberitakan konflik ini. Upaya yang telah diuraikan diatas dapat dispesifikasikan sebagai suatu Langkah diplomasi kemanusiaan yang diimplementasikan pada era Presiden Joko Widodo, dimana konflik ini pun terdengar pada kancan internasional.

Hubungan bilateral antar kedua negara in pun terbilang tanpa hambatan sepanjang terjadinya secara resmi. Namun hubungan keduanya pun bersifat dinamis diakibatkan karena permasalahan internal, yang salah satunya merupakan konflik dari etnis Rohingya. Presiden Joko Widodo pun berupaya merundingkan kepada beberapa negara terkait konflik ini seperti, Malaysia dan Thailand yang dimana masing-masing pihak bersepakat untuk setiap pengungsi yang berada pada wilayahnya masing-masing dapat menetap untuk jangka waktu satu tahun. (Irawati Jati dalam Achmad,2019)

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi pun menyampaikan hasil dari pertemuan yang dilakukan olhe Indonesia, Malaysia, dan juga Thailand yang pada sebelumnya semua pihak bersepakat untuk membiarkan para pengungsi setidaknya selama satu tahun untuk tetap berada di masing-masing wilayah. (Achmad,2019). Kemudian pada pertemuan selanjutnya melalui Menlu Indonesia bertemu dengan Aung Suu Kyi selaku pemimpin *de facto* Myanmar yang membicarakan tentang formula 4+1 untuk Myanmar. Empat elemen tersebut ialah ; mengembalikan stabilitas serta keamanan, secara maksimal menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan,

perlindungan untuk semua orang-orang yang berada pada wilayah Rakhine State tanpa melihat suku maupun agama. (Alam,2021;95)

Pada penelitian terdahulu bahwa penelitian dari Abri Hamzah yang berasal dari Universitas Hassanudin yang berjudul Pengaruh Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Krisis Kemanusiaan Rohingya Di Myanmar tahun 2018 . Penelitian tersebut berisikan bahwa peneliti menemukan kasus yang terjadi di Myanmar terkait pembantaian etnis Rohingya oleh etnis Rakhine yang dipicu karena adanya gerakan anti muslim hal ini berlanjut menjadi masalah kebencian antar umat beragama dan penindasan terkait kaum minoritas dikalangan masyarakat dengan berbagai macam permasalahan yang hadir.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah peneliti sama-sama membahas terkait isu yang serupa yang dimana bagaimana akhirnya Indonesia dapat membantu diaspora Rohingya dengan adanya proses diplomasi dengan Myanmar. Namun yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah fokus dari penelitian ini terhadap masalah kemanusiaan dan proses yang ditempuh Indonesia kepada Myanmar dalam studi kasus genosida etnis Rohingya.

Pada penelitian terdahulu bahwa penelitian dari Ipung Pramudya dan Made Selly Dwi Suryanti yang berasal dari Universitas Cendrawasih Jayapura dengan judul Keterlibatan Asean Dalam Menangani Konflik Myanmar tahun 2021. Penelitian tersebut berisikan bahwa ASEAN dalam menangani konflik yang terjadi di Rohingya yang dimana peran ASEAN menjadi organisasi yang ada di Asia Tenggara dan

mempunyai tanggung jawab penuh untuk dapat menyelesaikan konflik yang hadir di Myanmar.

Persamaan Penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terkait permasalahan atau isu yang diangkat yaitu genosida etnis Rohingya di Myanmar yang dimana ASEAN dibantu oleh Indonesia untuk membantu permasalahan tersebut dengan melalui *soft diplomacy*. Namun dalam penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang menjadi pembeda adalah peneliti lebih terfokus pada peran Indonesia dalam melakukan penanganan kasus pembantaian etnis Rohingya dengan melakukan proses diplomasi kemanusiaan dengan Myanmar untuk dapat diselesaikan.

Pada Penelitian terdahulu bahwa penelitian oleh Ardli Johan Kusuma dan Fernando Ersento Maraden Sitorus yang berasal dari Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta dengan judul Strategi Diplomasi Kemanusiaan Pemerintah Indonesia Dalam Kasus Krisis Kemanusiaan Yang Dialami Etnis Rohingya Di Myanmar Tahun 2017. Penelitian tersebut membahas mengenai akhirnya pemerintah memberikan bantuan kepada etnis Rohingya yang terampas HAM nya dan tertindas secara fisik oleh militer Myanmar yang dimana militer Myanmar ini berlatarbelakang etnis Rakhine.

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah bagaimana peran pemerintah Indonesia dalam menanggapi kasus tersebut dan membantu secara konkret melalui proses diplomasi dan bantuan – bantuan lainnya. Namun yang menjadi pembeda dari penelitian ini dengan yang terdahulu adalah mengenai upaya dari kedua belah pihak negara dalam menyelesaikan permasalahan yang hadir dan upaya preventif agar isu ini tidak lagi terjadi.

Menambahkan pada jawaban sebelumnya, konflik Rohingya di Myanmar juga dapat mengganggu stabilitas regional dan global karena dapat memicu krisis pengungsi. Sejauh ini, konflik tersebut telah mendorong ribuan orang Rohingya untuk melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, India, dan Thailand. Jumlah pengungsi Rohingya yang terus meningkat dapat menciptakan ketidakstabilan regional karena dapat menimbulkan masalah kemanusiaan di negara-negara tujuan. Negara-negara tersebut mungkin tidak memiliki sumber daya atau kapasitas yang cukup untuk menangani jumlah pengungsi yang besar, sehingga dapat menimbulkan ketidakamanan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut.

Selain itu, masalah pengungsi Rohingya dapat meningkatkan risiko perdagangan manusia, eksploitasi, dan kejahatan lintas batas. Hal ini dapat menjadi masalah global karena pengungsi Rohingya dapat berusaha untuk mencari perlindungan di negara-negara yang jauh dari Asia Tenggara, seperti Eropa atau Amerika Utara. Penting bagi komunitas internasional untuk bekerja sama dalam menangani krisis pengungsi Rohingya dengan cara yang manusiawi dan berkelanjutan. Hal ini dapat mencakup memberikan bantuan kemanusiaan yang memadai kepada pengungsi, membantu negara-negara tujuan dalam menangani masalah pengungsi, dan bekerja sama dengan pemerintah Myanmar dalam menyelesaikan konflik dan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi Rohingya di Myanmar.

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan diatas, maka peneliti tertarik membahas judul: **Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Myanmar Dalam Membantu Etnis Rohingya.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian terkait latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan pokok masalah yang akan diteliti yaitu terbagi ke dalam rumusan masalah sebagai berikut rumusan masalah mayor (umum) serta rumusan masalah minor (khusus).

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah mayor sebagai berikut: **“Bagaimana Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Myanmar Dalam Membantu Etnis Rohingya?”**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

Untuk memudahkan pembahasan hasil penelitian, maka inti masalah tersebut peneliti uraikan dalam beberapa sub masalah, diantaranya:

1. Upaya apa saja yang dilakukan oleh Indonesia dalam membantu etnis rohingya?
2. Apa kendala yang dihadapi Indonesia dalam melakukan diplomasi kemanusiaan?
3. Bagaimana hasil diplomasi Indonesia terhadap Myanmar dalam membantu etnis rohingya?

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini pembahasan difokuskan tentang permasalahan yang terjadi di Myanmar terkhusus pada etnis Rohingya yang menerima tindak kekerasan terhadap

umat muslim di Myanmar yang mengakibatkan migrasi besar-besaran termasuk ke Indonesia tahun 2017 hingga tahun 2023

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah minor yang telah dirumuskan oleh peneliti, maka menghasilkan analisis mengenai suatu diplomasi kemanusiaan indonesia terhadap myanmar dalam membantu etnis rohingya, melalui metode kualitatif studi deskriptif.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui **Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Myanmar Dalam Membantu Etnis Rohingya.**
2. Untuk menganalisis **Kendala Indonesia Dalam Melakukan Diplomasi Kemanusiaan.**
3. Untuk mengidentifikasi **Hasil Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Myanmar Dalam Membantu Etnis Rohingya.**

1.5 Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap penelitian ini bermanfaat secara teoritis maupun praktis.

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi perkembangan Ilmu

Hubungan Internasional terutama dalam konteks Isu kemanusiaan internasional.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan untuk Peneliti

Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai pengimplementasian ilmu yang selama ini diterima selama masa perkuliahan oleh peneliti baik teori maupun praktik dan berharap bisa melatih kemampuan dalam menelaah dan memecahkan masalah melalui penelitian yang dilakukan, serta dapat menambah ilmu dan pengetahuan bagi peneliti terutama mengenai Isu Kemanusiaan Internasional

2. Kegunaan untuk Akademik

Kegunaan penelitian ini yaitu diharapkan dapat berguna dan memberikan wawasan baru bagi mahasiswa UNIKOM secara umum, dan Program Studi Ilmu Hubungan Internasional khusus mengenai Isu Kemanusiaan Internasional

3. Kegunaan untuk Masyarakat

Hasil penelitian ini yaitu diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai bagaimana Diplomasi Kemanusiaan Indonesia Terhadap Myanmar Dalam Membantu Etnis Rohingya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sebagai bahan evaluasi bagi Universitas Komputer Indonesia, Peneliti dan Masyarakat Umum